

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS KOORDINASI DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KEPENGHULUAN MELAYU BESAR KECAMATAN
TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



YOLA ALVIONITA
NPM: 167110226

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Yola Alvionita
Npm : 167110226
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dikepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Pembimbing



Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yola Alvionita
Npm : 167110226
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dikepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

Nurmasari S.Sos., M.Si

Menyetujui,
Wakil Dekan I

Anggota

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Dia Meirina Suri S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 1670/UIR-Fs/Kpts/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: Eka Komalasari, S.Sos., M.Si
NIP/NPK	: 120202458
Pangkat/ Jabatan	: III/b - Lektor
Kedudukan	: Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama	: Yola Alvionita
NPM	: 167110226
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Analisis Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal 14 Desember 2021 s/d 14 Juni 2022, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan..

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si
NPK. 080102337

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi AP
3. Yth. Ka. Labor AP
4. Arsip SK Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yola Alvionita
Npm : 167110226
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu besar kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu ini dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022
An. Tim Penguji

Ketua



Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Nurmasari, S.Sos., M.Si

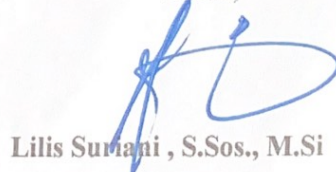
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I



Indra safri, S.Sos., M.Si

Program Studi
Ilmu Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Sumani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT karena dengan segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir”** .sebagai salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar keserjanaan pada program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW.yang telah mengorbankan jiwa dan raganya dami tegaknya kalimaul haq dijaat raya ini,beliau juga sebagai suri teladan yang membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan .

Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tinggi nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam benntuk arahan,petunjuk,dan bimbingan kepada penulis disaat penulis mengalami kesulitan dalam penulisan Skripsi ini,sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Ibu Lilis Suriani, S. Sos., M.Si, selaku ketua Program studi administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Eka Komalasari, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan kesediaannya untuk meluangkan waktu kepada penulis demi kesempurnaan Skripsi ini .
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik, membagi ilmunya, dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh staff Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.
7. Terkhusus dan Teristimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Kedua Orang Tua Ayahanda tercinta (Julinus) Ibunda Tercinta (Zaidar), serta Keluarga Besar Yang tidak Henti hentinya mendoakan dan tidak pernah letih memberikan motivasi, dukungan secara moril dan materil selama penulis melaksanakan studi
8. Kepada abangku Tersayang (Epi), Kakak Ku Tersayang (Iyen), Adik Ku Tersayang (Cici), Oom ku Tersayang (Mijo), dan keponakanku yang Tersayang (Adel, Aldo, Hilmy, Chyla, Vayla, Zhivana) yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta Doa kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
9. Kepada teman saya tercinta Reniza Ulfa, Vina Sastra Viana, Fajar Rinarti yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi yang begitu

besar sehingga mendorong penulis untuk lebih giat dan semangat dalam mengerjakan Skripsi ini.

10. Buat Rekan rekan administrasi kelas B angkatan 2016 yang telah memberi semangat dan dukungan moril kepada penulis dalam usulan penelitian ini.

Walau Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan Skripsi ini, tetapi karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf dalam penulisan Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran serta masukan dari pihak-pihak yang menginginkan kesempurnaan.

Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama bagi penulis sendiri sehingga mendapatkan tambahan ilmu dikemudian hari serta semoga Allah SWT senantiasa memberikan kasih sayang kepada mereka yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

Yola Alvinita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	14
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	 16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Administrasi	16
2. Konsep Organisasi	18
3. Konsep Manajemen	21
4. Konsep Koordinasi	23
5. Konsep Pemberdayaan masyarakat.....	28
6. Konsep Pemerintahan Desa.....	33
B. Kerangka Pikir	36
C. Konsep Operasional	37
D. Operasional Variable.....	39
E. Teknik Pengukuran	40
 BAB III METODE PENELITIAN	 54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Populasi Dan Sampel	55
D. Teknik Penarikan Sampel	56
E. Jenis dan Sumber Data	56

F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	59
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	60
A. Sejarah singkat kecamatan Tanah Putih tanjung melawan	60
B. Struktur Organisasi.....	64
C. Fungsi dan Tugas Organisasi	65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Identitas Responden penelitian	72
B. Hasil dan pembahasan	76
C. Rekapitulasi jawaban responden	95
D. Faktor-faktor penghambat	98
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah penduduk Kepenghuluan Melayu Besar	8
Tabel 1.2	APBkep Melayu Besar 2019	10
Tabel 1.3	Program kerja APBkep Melayu Besar	10
Tabel 1.4	Program kerja bidang pemberdayaan Kepenghuluan Melayu Besar yang sudah dan belum terealisasi	12
Tabel 1.5	Program pemberdayaan masyarakat yaitu pembuatan kolam ikan darat di Desa Melayu Besar	13
Tabel 2.1	Operasional variabel Pelaksanaan Koordinasi dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan	39
Tabel 3.1	Populasi Dan Sampel Kepenghuluan Melayu Besar	55
Tabel 3.2	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian	59
Tabel 5.1	Distribusi jawaban responden penelitian berdasarkan umur di kepenghuluan meayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan	73
Tabel 5.2	Distribusi jawaban responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan di kepenghuluan meayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan	74
Tabel 5.3	Distribusi jawaban responden penelitian berdasarkan jenis kelamin di kepenghuluan meayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan	75
Tabel 5.4	Tanggapan Responden Kepala Dusun dan BPKep di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan berdasarkan indikator kerjasama	77

Tabel 5.5	Tanggapan Responden Masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan berdasarkan indikator kerjasama.....	78
Tabel 5.6	Tanggapan Responden Kepala Dusun dan BPKep di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan berdasarkan indikator pembagian kerja.....	81
Tabel 5.7	Tanggapan Responden Masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan berdasarkan indikator pembagian kerja.....	83
Tabel 5.8	Tanggapan Responden Kepala Dusun dan BPKep di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan berdasarkan indikator komunikasi	86
Tabel 5.9	Tanggapan Responden masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan berdasarkan indikator komunikasi	87
Tabel 5.10	Tanggapan Responden Kepala Dusun dan BPKep di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan berdasarkan indikator Disiplin	91
Tabel 5.11	Tanggapan Responden masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan berdasarkan indikator Disiplin	92
Tabel 5.12	Rekapitulasi Tanggapan Responden kepala dusun dan BPKep di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan.....	95
Tabel 5.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden masyarakat di kepenghuluan melayu brsar kecamatan tanah putihh tanjung melawan.....	96

ANALISIS KOORDINASI DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KEPENGHULUAN MELAYU BESAR KECAMATAN
TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

YOLA ALVIONITA

Koordinasi merupakan fungsi administrasi manajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan dan, menyelaraskan kegiatan masyarakat, kelompok atau organisasi agar terlaksana menjadi lebih tertib, teratur, dan lancar secara efisien dan efektif di dalam penelitian ini penulis mengacu pada teori koordinasi dalam buku Hasibuan yang terdiri dari empat indikator yaitu, kerjasama, pembagian kerja, komunikasi dan disiplin. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif (sugiyono,2012:7-8). Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel disesuaikan dengan populasinya di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sensus dan di dalam penarikan sampel untuk responden masyarakat peneliti menggunakan rumus slovin, sugiyono (2012). Di dalam penelitian ini penulis mendapatkan sampel berjumlah 105 orang responden yang diantaranya responden perangkat kepenghuluan sebanyak 9 orang dan responden masyarakat sebanyak 96 orang. Dari hasil pengumpulan data yang menggunakan teknik kuesioner, wawancara, observasi serta dokumentasi, pelaksanaan Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kepenghuluan Melayu Besar belum berjalan secara efektif atau dikategorikan cukup terlaksana. Masih banyak hal yang perlu dimaksimalkan dari pemberdayaan masyarakat pada di kepenghuluan Melayu Besar sehingga dapat menjadi kepenghuluan yang partisipatif serta berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Sehingga program dalam pembuatan kolam ikan darat dapat terealisasi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat jika dikelola dengan baik.

Kata kunci : koordinasi ,pemberdayaan masyarakat ,kepenghuluan melayu besar

**COORDINATION ANALYSIS IN COMMUNITY EMPOWERMENT
ACTIVITIES IN THE ESTABLISHMENT OF MELAYU BESAR DISTRICT
TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN ROKAN HILIR DISTRICT**

ABSTRACT

YOLA ALVIONITA

Coordination is a management administration function that is concerned with efforts to direct, balance and harmonize community, group or organization activities so that they can be carried out more orderly, orderly, and smoothly efficiently and effectively. four indicators, namely, cooperation, division of labor, communication and discipline. This type of research uses quantitative descriptive (Sugiyono, 2012: 7-8). data collection techniques obtained by means of observation, interviews, questionnaires, and documentation. The sampling technique is adjusted to the population. In this study the author uses the census technique. And in sampling for community respondents, the researcher uses the Slovin formula, Sugiyono (2012). In this study, the authors obtained a sample of 105 respondents, of which 9 people were civil servants and 96 community respondents. From the results of data collection using questionnaires, interviews, observation and documentation techniques, the implementation of Coordination in Community Empowerment Activities in the Great Malay Penghuluan has not run effectively or is categorized as quite implemented. There are still many things that need to be maximized from community empowerment in the Great Malay Penghuluan so that it can become a participatory and sustainable kepenghuluan and synergize development and community empowerment.

Keywords: coordination, community empowerment , kepenghuluan melayu besar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen pemerintah modern didasarkan atas spesialisasi atau pembagian kerja jabatan-jabatan di uraikan dalam tugas-tugas berulang satu persatu dan dipercaya kepada individu-individu baik bekerja dalam bagian yang sama maupun yang bekerja dalam bagian-bagian pemerintahan yang berlainan. akan tetapi hanya dengan penerapan spesialisasi saja tidak memungkinkan suatu organisasi mencapai hasil yang diinginkan oleh karena jabatan-jabatan di wujudkan dan di bagikan di antara unit-unit maka koordinasi adalah perlu koordinasi atau integrasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik diantara kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan rohaniyah. Koordinasi adalah penting dalam organisasi-organisasi yang kompleks, karena disitu dapat terbanyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh orang dalam banyak bagian kebutuhan akan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantung diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut di koordinasikan.

Koordinasi merupakan fungsi administrasi manajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok

orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, sedang sebagai tujuan pemberdayaan terarah pada keadaan dan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan memenuhi kebutuhan hidup yang baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan merupakan Kepenghuluan yang membutuhkan percepatan pembangunan terutama dibidang pemberdayaan, agar bisa secepatnya minimal setingkat dengan Kepenghuluan-Kepenghuluan lain yang berada di kecamatan tanah putih Tanjung Melawan. dalam planning yang ditetapkan pemerintah telah hampir sempurna, hanya saja masih adanya hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan, dalam pengelolaannya di butuhkan suatu koordinasi yang baik antar pihak yang mengelolanya, agar terjalin kerjasama yang baik. Dengan terciptanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan tersebut maka pembangunan yang di cita-citakan masyarakat setempat dapat

terealisasi dengan maksimal sesuai tujuan dari program pemberdayaan itu sendiri. Akan tetapi target atau tujuan tidak seimbang dengan realisasinya.

Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Kepala Kepenghuluan Melayu Besar Selaku Pembina. Antara tujuan dengan realisasi terdapat kesenjangan sehingga proses pencapaian tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak maksimal. Hal ini belum sesuai dengan tujuan utama dari program pemberdayaan masyarakat ini dimana tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan lebih partisipatif. Penelitian ini kerangka berfikirnya dipengaruhi oleh koordinasi dengan mempengaruhi beberapa indikator seperti komunikasi, tanggung jawab, proses, kesatuan tindakan, dan pembagian kerja. Untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut maka di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan .

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar adalah perangkat kepenghuluan dimana antara nya yaitu Kepala Kepenghuluan, sekretaris kepenghuluan, kaur kesra, kepala dusun. dan juga masyarakat ikut dalam koordinasi dalam kegiatan ini

Unit Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kepenghuluan Melayu Besar di tuntut untuk harus mengetahui kondisi internal Kepenghuluan Melayu Besar demi

pencapaian rencana dan kegiatan yang akan di laksanakan. Untuk itu koordinasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Adapun manfaat dari koordinasi yang baik dalam suatu organisasi yaitu, antara lain:

1. Tanpa koordinasi akan dapat menumbuhkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satu bagian atau jabatannya merupakan yang paling penting.
 2. Tanpa koordinasi akan dapat mengakibatkan timbulnya pertentangan antar satu bagian dengan bagian yang lainnya.
 3. Tanpa koordinasi akan dapat menimbulkan kurangnya tingkat kesadaran di antara bagian untuk saling bekerjasama.
 4. Tanpa koordinasi tidak dapat di jamin adanya kesatuan langkah antar bagian.
- Komunikasi

Dalam pelaksanaan suatu koordinasi, sangat di perlukan suatu komunikasi yang lancar antar pihak yang terkait dalam pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih tajung Melawan Kabupaten Rokan Hilir agar terjalin suatu hubungan kerjasama yang harmonis guna kelancaran dan pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih tajung Melawan Kabupaten rokan hilir. Komunikasi dapat membantu pelaksanaan perencanaan yang telah di buat oleh pemerintah. Dari komunikasi ini di harapkan kepada pihak-pihak yang mengelola program pemberdayaan masyarakat khususnya pihak yang terlibat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih tajung Melawan mengerti akan tujuan dari perencanaan yang telah dibuat. Dimana

komunikasi adalah alat untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar. koordinasi yang terjalin antara pemerintah kepenghuluan yaitu dengan di adakan nya musyawarah/rapat dengan kepala dusun mengenai kegiatan pemberdayaan ini dimana disetiap dusun tersebut akan dibangun satu kolam ikan darat disetiap dusun nya . Komunikasi yang paling penting dalam pelaksanaan koordinasi adalah dengan diadakannya rapat atau pertemuan-pertemuan yang sifatnya memberikan input dalam menjalankan tugas dari pihak-pihak terkait.

- **Kerjasama**

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kerja sama adalah inti dari pada koordinasi. Kerja sama dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kerja sama ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

- Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih dari pada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggungjawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi-baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu. Agar koordinasi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana, perlu adanya pembagian kerja dari masing-masing pegawai untuk mengetahui siapa yang melaksanakan tugas, tugas apa yang harus dilakukan, dan nantinya kepada siapa tugas dapat di pertanggung

jawabkan. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai perlu menciptakan hubungan kerjasama yang baik, dapat melaksanakan tugas secara bersama-sama, sehingga tugas yang dikerjakan terkoordinir dengan baik dan kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugas dapat dihindari. Dengan adanya pembagian kerja dan hubungan kerjasama dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar, diharapkan tujuan yang telah ditetapkan dan pembangunan yang diharapkan masyarakat dapat tercapai serta misi yang sudah di gariskan dapat terwujud.

Selain itu, pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar dapat membantu dalam proses percepatan pembangunan di Kepenghuluan tersebut. Dengan kata lain, untuk menciptakan koordinasi antar kelompok dalam bentuk kerjasama pembagian kerja perlu diklasifikasikan agar tugas dapat terkoordinir dengan baik. Koordinasi dalam hal ini menyangkut mengenai adanya pembagian kerja dan adanya hubungan kerja. Pembagian kerja yang ada dalam tiap bagian hendaknya perlu disertai dengan adanya hubungan kerja antar semua pihak yang melakukan koordinasi, dimana pihak-pihak terkait dapat saling bekerjasama untuk melaksanakan program yang telah diprogramkan. Tanggung jawab dari UPK Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan sangat diperlukan dalam pembagian kerja dan hubungan kerja yang dilakukan agar tugas terlaksana dengan baik.

- Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang

diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan kedisiplinan.

Berdasarkan perolehan data dari Kantor Camat Tanah Putih Tanjung Melawan jumlah Penduduk di Kecamatan Tanjung Melawan di tiap Kepenghuluan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan

No	Kelurahan /Kepenghuluan	Jumlah KK	Penduduk		
			LK	PR	Jumlah
1	Melayu Besar kota	424	870	860	1,730
2	Melayu Besar	1712	3,391	3,194	6,585
3	Melayu Tengah	272	509	519	1,028
4	Batu Hampar	211	484	531	1,015
5	Mesah	308	641	599	1,240
6	Labuhan Papan	686	1,354	1,356	2,710
	Jumlah	3,611	7,249	7,059	14,308

Sumber: Kantor Kepenghuluan melayu besar 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan terdapat 5 Kepenghuluan dan 1 Kelurahan, dan dari tabel di atas dapat pula diketahui di antara 5 Kepenghuluan tersebut, Kepenghuluan

Melayu Besar merupakan Jumlah Penduduk yang paling banyak, jadi inilah alasan saya mengangkat Kepenghuluhan Melayu besar untuk diteliti terkhususnya tentang pelaksanaan Koordinasi dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Permen Desa PDTT 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kepenghuluhan.

Pengalokasian anggaran dana Kepenghuluhan yang berasal dari dana pusat DD (Dana Desa) dari kabupaten ADD (Alokasi Dana Desa), dari, tunda salur PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan), Tunda salur ADD, dan SILVA tahun 2018, dan dana Provinsi dapat menjamin pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan APBkep (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluhan) dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 APBKep Melayu Besar tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	Rp.947.748.000
2	Desa Dana	Rp.966.048.000
3	Tunda Salur ADD dan Tunda Salur PBB 2018	Rp.513.900.362
4	SILVA 2018	Rp. 300.566.706
5	Dana Provinsi	Rp.200.000.000
	Total	Rp. 2.928.263.068

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan melayu besar 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di dalam APKep Melayu Besar terdapat 5 anggaran Dana Pada Tahun 2019, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Tunda salur ADD dan Tunda Salur PBB 2018, Silva 2018, dan Dana Provinsi. dari Kelima anggaran dana Tersebut yang paling banyak anggaran dananya adalah dari Dana Desa (DD) yaitu sebesar Rp.966.048.000. dan paling sedikit anggaran dana adalah Dana Provinsi.

Tabel 1.3 Program Kerja APBKep Melayu Besar Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.715.648.668
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.1.873.665.400
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 168.650.000

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 130.299.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	RP. 40.000.000
	Jumlah	Rp. 2.928.263.068

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan melayu besar 2019

Dapat dilihat pada tabel 1.3 bahwa ada 5 program kerja APBKep Melayu Besar tahun 2019 yang terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Dan dari ke 5 program tersebut saya meneliti apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kepenghuluan Melayu Besar pada tahun 2019 dan bagaimana koordinasi dalam kegiatan tersebut

Pemberdayaan Pada Dasarnya merupakan segala bentuk kegiatan manusia (masyarakat dan pemerintah) di Desa Dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di wilayah desa serta dalam upaya perbaikan/ perubahan untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi melalui potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang telah dimiliki.

Dalam pasal 1 Permen Desa PDTT Nomor 17 tahun 2019 tentang tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dan dapat dilihat pada program bidang Pemberdayaan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4 Program Kerja Bidang Pemberdayaan di Kepenghuluan Melayu Besar Tahun 2019

No	Jenis program pemberdayaan	Jumlah dana	Sumber dana	Capaian program
1	Kolam ikan darat Dusun I,Dusun II,Dusun III,Dusun IV,Dusun V	Rp.50.299.000	DD	Belum Terealisasi
2	Pelatihan Aparatur Desa	Rp.50.000.000	DD	Sudah Terealisasi
3	Pelatihan Bimtek Pemerintah Desa ke Luar Daerah	Rp.30.000.000	DD	Sudah Terealisasi
Jumlah		Rp.130.299.000		

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan melayu besara 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 3 Program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan melayu besar pada tahun 2019 terdapat 2 kegiatan yang terealisasi yaitu Pelatihan Aparatur Desa, dan Pelatihan Bimtek Pemerintah Desa Ke luar daerah. yang belum terealisasi yaitu Pembuatan Kolam Ikan Darat yang berada di beberapa Dusun.

Tabel 1.5 Program Pemberdayaan Masyarakat yaitu pembuatan kolam ikan darat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan tanah Putih Tanjung Melawan

No	Dusun	Jumlah				Anggaran dana setiap dusun
		RW	RT	KK	Pembuatan Kolam Ikan darat	
1	Dusun I	1	5	425	Sudah terealisasi	Rp.10.059.800
2	Dusun II	1	7	400	Sudah terealisasi	Rp.10.059.800
3	Dusun III	1	5	313	Belum terealisasi	Rp.10.059.800
4	Dusun VI	1	5	192	Belum terealisasi	Rp.10.059.800
5	Dusun V	2	8	382	Belum terealisasi	Rp.10.059.800
Jumlah		6	30	1712		Rp.50.299.000

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan melayu besara 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam program pemberdayaan yaitu pembuatan kolam ikan darat di Kepenghuluan Melayu Besar masih ada sebagian yang belum terealisasi. yang terealisasi dalam pembuatan kolam ikan ini hanya terdapat di Dusun I dan Dusun II, sementara di tiga dusun lainnya belum terealisasi yaitu di dusun III, VI, dan V

Ketika kita mengacu pada Tabel 1.5 terlihat bahwa ada beberapa dusun dalam pembuatan kolam ikan darat belum terealisasi, ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara Kepenghuluan dengan masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan pembuatan kolam ikan darat, padahal ini merupakan program pemberdayaan yang bisa membantu perekonomian masyarakat setempat jika benar-benar berkembang

dengan baik, jika dari pihak Kepenghuluan melakukan koordinasi dengan baik terhadap masyarakat pasti semua akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Koordinasi dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kcamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Koordinasi dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kcamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Koordinasi dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Puti Tanjung Melawan

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan koordinasi dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat Di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Puti Tanjung Melawan

Kegunaan penelitian

1. Akademik yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan kontribusi pemikiran ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang administrasi.
2. Teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi dan ditemukannya hal hal yang baru yang selama ini belum dapat perhatian.
3. Praktis yaitu penelitian dapat diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan masukan peneliti yang akan datang untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Farid Ali (2011 : 19) secara terminologi bahwa yang disebut dengan administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang telah diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik.

White (dalam sufian 2003:80) Administrasi merupakan suatu kegiatan dalam sebuah kelompok yang didalamnya terdapat kerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya untuk untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Siagian dalam (syafiie, 2003:5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Gordon dalam Syafiie (2013:33) mengatan bahwa administrasi adalah proses baik yang dilakukan organisasi atau perorangan maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif dan peradilan.

Administrasi adalah sebagai kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama (dalam Pasalong,2013:2) . Menurut Nawawi bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya (dalam syafiie,2003 :5) Lebih lanjut lagi menurut Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (dalam syafiie,2003 :4) . Administrasi juga sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern (social phenomenon), secara eksplisit tergambar dalam pendapat waldo,yaitu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi (dalam Zulkifli,2014 :11) . Ragam pengertian untuk menenrangkan lingkung konsep administrasi menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli 2009 :9) yaitu:

Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.

Organisasi modern sebagai badan adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*pupose*) dan tujuan (*goals*), usahanya, sumber pendanaan nya, serta langkah langkah yang akan ditempuh dalam pencapaian tujuan.

Didalam organisasi setiap organisasi dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan

bertujuan) oleh administrator. Administrator bisa perorangan dan bisa suatu dewan. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabannya melalui apa yang disebut administrasi.

Dapat kita pahami dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah proses kerjasama sekelompok orang yang terdiri dari lembaga lembaga hingga ke media massa dan masyarakat sipil dalam merumuskan, mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untum memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan negara secara efisien dan berkeadilan sosial.

2. Konsep Organisasi

Pentingnya suatu organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen terlihat apabila diingat bahwa bergerak atau tidaknya organisasi kearah pencapaian tujuan sangat tergantung atas kemampuan manusia didalam organisasi untuk menggerakkan organisasi tersebut kearah yang telah ditetapkan.

Menurut Hasibuan (2013:24) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari kelompok orang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama sama secara formal dan terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan (Siagian 2003:6).

Defenisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan kegiatan administrasi dijalankan.
- b. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi anatar orang orang dalam suatu ikatan formal.

Seperti yang telah dirumuskan oleh siagian (2003;97) bahwa Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuan untuk menciptakan suatu organisasi yang baik. Yang dimaksud organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri ciri sebagai berikut :

1. Terdapat tujuan yang jelas
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
4. Adanya kesatuan arah
5. Adanya kesatuan perintah
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang
7. Adanya pembagian tugas
8. Struktur organisasi harus disusun sesedarhana mungkin
9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen
10. Adanya jaminan jabatan

11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya

Adapun Ciri ciri organisasi diatas diterapkan sebagai acuan dalam menjalankan setiap kegiatan didalam organisasi. Sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut berjalan.

Menurut Manulang organisasi merupakan di dalam arti yang dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagia pekerjaan yang akan dilakukan penetapan tugas tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur unsur organisasi sehingga memungkinkan orang orang dapat bekerja bersama sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan bersama. (dalam hasibuan,2002 :24)

Dari beberapa defenisi defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa defenisi organisasi adalah suatu tempat atau wadah dimana terjadi hubungan individu dan kelompok baik dalam organisasi itu sendiri maupun diluar organisasi, terjadi kerja sama dan pembagian tugas didalam organisasi, berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing untuk mempermudah dalam mencapai tujuan di dalam organisasi tersebut dan terselenggaranya kegiatan administrasi

3. Konsep Manajemen

Manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan

sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan kegiatan orang lain.

Manajemen adalah sebuah proses khusus,yang terdiri dari kegiatan kegiatan perencanaan, pengorganisasian menggerakan dan mencapai sasaran sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lain. (dalam Winardi 2009:30)

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. menurut Stoner (dalam Handoko,2002;2)

Menurut Siagian (2011;5) manajemen adalah proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan apa yang ingin dicapai serta tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan kegiatan orang lain.

Darwis dkk mengatakan bahwa Manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada (2009;5)

Selanjutnya Hasibuan (2006:2) Manajemen adalah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lainnya

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dan manajemen merupakan :

“suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penegndalian yang dilakukan untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu individu yang menyumbangkan upaya yang terbaik melalui tindakan tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya “.

Menurut penadapat Brantas (2009:13) Manajemen dinyatakan dalam 6 M, *Man, Money, Methods, I Aterials, Machines, Markets*. Namun pada unsur Man (Manusia) ini merupakan unsur yang sangat penting dari pada unsur lainnya, karena manusia sebagai penggerak atau pelaksana dari pada unsur unsur manajemen lainnya.

Pada hakikatnya bahwa manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Manajemen merupakan segala rangkaian aktifitas menggerakkan kelompok orang yang berada didalam organisasi dalam pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi fungsi manajemen. Dan organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen.

Dari beberapa defenisi manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah seni dalam mengatur sistem baik orang dan perangkat lain agar dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Konsep Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut Ismail Solihin (2009: 91), karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan.

Hasibuan (2009 : 85) berpendapat bahwa : “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Menurut Yohanes Yahya (2006: 95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Handoko (2003: 195), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Indikator dalam penelitian ini diambil dari faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut, yang digunakan sebagai tolak ukur koordinasi kinerja pegawai. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2011:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut: 1. "Kerja Sama 2. Komunikasi 3. Pembagian Kerja 4. Disiplin"

Kerja sama, Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berartibahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Komunikasi, Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan

berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:

- ✓ Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan;
- ✓ Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan;

Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku

orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikan kepada orang tersebut.

Pembagian Kerja, Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan terorganisasi dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorang pun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorang pun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu

Disiplin, Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang

diharapkan. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Menurut Manullang (2008: 72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Richard L. Daft (2011: 30) koordinasi (coordination) mengacu pada kualitas kolaborasi di antara departemen.

Menurut Manullang (2008: 72-73), koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut:

Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan. Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan. Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Pimpinan atau atasan

mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan. Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti tersebut diatas adalah amat perlu sebab adanya kegiatan koordinasi dapat menghindarkan terjadi konflik mengurangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingan unit sendiri dan memperkukuh kerja sama. Dengan setiap koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir.

5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan er- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, erdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merrian Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian: *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai member kecakapan atau memungkinkan dan *To give power of authority to*, yang berarti member kekuasaan. Menurut Wasistiono (2001:71) mengatakan bahwa :

Pemberdayaan adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya sendiri secara

mandiri. Dengan demikian inti pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, baik dari individu, kelompok maupun masyarakat.

Roesmidi dan Risyanti (2006:1) menyatakan bahwa Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. *Daya* artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan —m- dan akhiran —an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Selanjutnya Mardikanto, (2009:12) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah pemberian kesempatan untuk secara bebas memilih berbagai alternatif dan mengambil keputusan sesuai dengan tingkat kesadaran. Kemampuan dan keinginan mereka serta memberi kesempatan kepada mereka belajar dari keberhasilan serta kegagalan dalam merespon terhadap perubahan sehingga mampu mengendalikan masa depannya.

Suharto, Edi (2005:58) menyatakan bahwa menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;

Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang

mereka perlukan; Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Priyono (2004:12) menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi.

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:56) menyatakan bahwa "Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi" bukan sebuah "proses instan". Lebih lanjut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:41) menyatakan bahwa :

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkah harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia umumnya dan Masyarakat khususnya yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketertinggalan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitan dan pendayaan.” Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:56) secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, *belief*, dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “*demand*”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang lain)

Tahap kedua adalah pengkapasitan. Inilah yang sering disebut dengan capacity building, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau capacity building untuk membuat mereka “cakap” (skilfull) dalam mengelola otonomi yang diberikan. Proses capacity building terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai.

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Tri Winarti (2006:12) menyatakan bahwa “inti pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan memperkuat kemandirian.” Menurut Edi Suharto (2009:49) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

6. Konsep Pemerintah Desa

Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surasih, (2012: 23) mendefinisikan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya

ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

7. Konsep Pemerintah Desa

Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surasih, (2012: 23) mendefinisikan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

H.A.W. Widjaja (2013: 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pambudi, (2012: 50) pemerintahan desa dapat diartikan sebagai

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintah desa.

Awang (2010: 45) pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Widjaja (2013: 3) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD”.

Soemantri (2011: 157) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
- Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
- Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretariat desa.
- Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.

- Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:
- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- Mengajukan rancangan peraturan desa.
- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- Membina kehidupan masyarakat desa.
- Membina perekonomian desa.
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan wewenang lai sesuai dengan peraturan perundangundangan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator indikator terkait didalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel penelitian ini tentang Analisis Koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat di kepenghuluan Melayu

Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Secara rinci dapat dilihat pada bagian bawah.

Gambar II.I Kerangka Pikir Koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir



- Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/kelompok yang disebut bawahan.
- Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka
- penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan rang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan kegiatan orang lain.
- Kordinasi adalah suatu usaha penyelarasan dari bagian atau unit-unit yang satu dengan lainnya dala berbagai kegiatan sebagai usaha mencapai tujuan organisasi
- Pemberdayaan adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri. Dengan demikian inti pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, baik dari individu, kelompok maupun masyarakat
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Kerjasama adalah suatu bentuk usaha bersama antara bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti.
- Pembagian kerja timbul karena seseorang melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu, pembagian kerja berarti pengkhususan yang di pertimbangkan antar lain perincian tugas, pengadaan dan penempatan pegawai, kewajiban dan tanggung jawab agar terdapat efisiensi dalam menggunakan tenaga atau antara instansi-instansi yang terkait
- Disiplin adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus disiplin dalam mengatur usaha-usaha/tindakan tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.

D. Operasional Variabel

Tabel 2.1 Operasional variabel Koordinasi dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kepengghuluan Melayu Besar Kecamatan tanah Putih Tanjung melawan Kabupaten Rokan Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
--------	----------	-----------	----------------	------------------

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur dan manajemen pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi, Hasibuan (2006;85)	Koordinasi	1. Komunikasi	Sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Terjalinnnya koordinasi antara instansi terkait mengenai pelaksanaan pembedayaan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Kerja sama	Ada tidaknya bentuk kesepakatan Ada tidaknnya pelaksana kegiatan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		3. Pembagian Kerja	Pembagian ugas pada kegiatan pemberdayaan masyarakat Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		4. Disiplin	Ada tidaknnya sanksi bagi pelanggar kesepakatan	Terlaksana Cukup

			Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi	Terlaksana Kurang Terlaksana
--	--	--	---	-------------------------------------

Sumber :modifikasi peneliti 2022

E. Teknik Pengukuran

Teknik penelitian ini untuk pengukuran dari masing-masing indikator pada koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa melayu besar diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu terlasana, cukup terlaksana kurang terlasana. dan sedangkan untuk pengukurannya menggunakan teknik menggunakan teknik pengukuran *skala likert*, yaitu menurut Sugiyono adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mngukur sikap, pendapat, dan persepsi sekelompok orang tentang fenomena-fenomena social yang terjadi di lokasi penelitian. Skala likrt yaitu dengan memberikan nilai skor 3, cukup terlaksana 2, kurang terlaksana 1.

1. Pengukuran Variabel (Responden Perangkat kepenghuluan)

$$\text{Interval} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah}}{\text{jumlah kategori}}$$

Dimana:

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 20 \times 9 = 540$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 20 \times 9 = 180$$

$$\text{Interval} = \frac{(540-180)}{3} = 120$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap variabel dari responden perangkat kepenghuluan pada koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan kabupaten rokan hilir dengan jumlah responden 9 orang dan 20 pertanyaan yaitu diperoleh untuk responden dengan skor tertinggi 540 dan untuk skor terendah 180 dengan jarak interval 120. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut:

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 421- 540

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 301-420

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 180-300

1. Pengukuran Indikator (Responden Perangkat kepenghuluan)

$$\text{Interval} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah} - 1}{\text{jumlah kategori}}$$

Dimana:

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 5 \times 9 = 135$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 5 \times 9 = 45$$

$$\text{Interval} = \frac{135 - 45}{3} = 30$$

Koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan kabupaten rokan hilir , kriteria pengukurannya adalah:

1. Kerja sama. Diajukan 5 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan, skor tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 106-135

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 76-105

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 45-75

2. Pembagian kerja . Diajukan 5 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu

besar kecamatan tanah putih tanjung melawan, skor tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 106-135

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 76-105

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 45-75

3. Komunikasi . Diajukan 5 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan, skor tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 106-135

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 76-105

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 45-75

4. Disiplin . Diajukan 5 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan, skor tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 106-135

Cukup Terlaksana : jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 76-105

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 45-75

1. Pengukuran Variabel (Responden Masyarakat)

$$\text{Interval} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah}}{\text{jumlah kategori}}$$

Dimana:

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 20 \times 96 = 5.760$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 20 \times 96 = 1.920$$

$$\text{Interval} = \frac{(5.760 - 1.920)}{3} = 1.280$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap variabel dari responden masyarakat pada koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan dengan jumlah responden 96 orang dan 20 pertanyaan yaitu diperoleh untuk responden dengan skor tertinggi 5.760 dan untuk skor terendah 1.920 dengan jarak interval 1.280 Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut:

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 4.481-5.760

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih

tanjung melawan berada pada interval nilai skor 3.201 - 4.480

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 1.920 - 3.200

2. Pengukuran Indikator (Responden masyarakat)

$$\text{Interval} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah}}{\text{jumlah kategori}}$$

Dimana:

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 5 \times 96 = 1.440$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 5 \times 96 = 288$$

$$\text{Interval} = \frac{(1.440 - 288)}{3} = 384$$

Koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan kabupaten rokan hilir , kriteria pengukurannya adalah:

1. Kerja sama. Diajukan 5 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan, skor tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 1.057 - 1440

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 673 - 1.056

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 384-672

2. Pembagian kerja . Diajukan 5 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan, skor tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 1.057 - 1440

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 673 - 1.056

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 384-672

3. Komunikasi . Diajukan 5 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan, skor tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 1.057 - 1440

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 673 - 1.056

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 384-672

4. Disiplin . Diajukan 5 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan, skor tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 1.057 - 1440

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 673 - 1.056

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat di kepenghuluan melayu besar di kecamatan tanah putih tanjung melawan berada pada interval nilai skor 384-672



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan didalam penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendiskripsikan fenomena dan kejadian yang berlangsung dilapangan pada saat tertentu, metode pengambilan data dilakukan dengan observasi atau penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan mengemukakan dan menggambarkan gejala gejala secara lengkap tentang aspek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif (Sugiyono, 2012 : 7-8).

B. Lokasi Penelitian

Didalam penelitian ini penulis mengambil Lokasi penelitian yang dilakukan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir , maksud peneliti melakukan penelitian di desa ini karena terdapat fenomena fenomena masalah yang ditemukan dalam proses Koordinasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir yang belum optimal dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan inilah yang membuat peneliti begitu tertarik untuk

membahas tentang Analisis pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, dengan begitu dapat memberikan masukan kepada Kepenghuluan tersebut dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan rujukan dalam meningkatkan pelaksanaan Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono 2012 :80).

Sampel adalah bagian atau adalah bagian atau bisa juga disebut dengan jumlah dan karakteristik yang memiliki populasi.

Tabel 3.1 Tabel Populasi Dan Sampel Kepenghuluan Melayu Besar

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa	1	1
2	Sekretaris Desa	1	1
3	Kepala Seksi Kesra	1	1
4	Badan Permusyawaratan Kep	1	1
5	Kepala Dusun	5	5
6	Masyarakat Melayu Besar	1712	96
	Jumlah	1721	105

Sumber : modifikasi peneliti 2022

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam setiap penelitian teknik penarikan sampel disesuaikan dengan populasinya. Teknik sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Adapun penarikan sampel dalam Analisis Pelaksanaan Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Penarikan sampel untuk kepala desa, Sekretaris desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kepala dusun, BPKep menggunakan teknik sensus yang merupakan suatu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Adapun penarikan sampel untuk masyarakat menggunakan Rumus slovin. rumus slovin adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, Sogiyono (2012).

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang telah digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis peroleh langsung dari sumber asli (langsung dari informasi) yang memiliki informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden pihak penelitian mengenai pelaksanaan Pembangunan di Desa Kepenuhan Barat Mulia Kecamatan Kepenuhan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh langsung dari hasil pengumpulan atau karya orang lain yakni data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan melalui tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Berupa bahan bacaan dan literature yang relavan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Didalam memperoleh data data serta informasi lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai rujukan didalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung terhadap focus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut.

1. Interview (wawancara)

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan tatap muka langsung untuk melakukan wawancara langsung dengan responden yang dianggap mengetahui data data yang peneliti butuhkan, dan tentunya dalam hal ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa keterangan lebih lanjut.

2. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti telah terlibat langsung atau melakukan pengamatan langsung mengenai Analisis Pelaksanaan Koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan

3. Kuesioner

Suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti telah mempersiapkan dan menyusun secara sistematis melalui penyebaran daftar pertanyaan yang berkaitan dengan Analisis Pelaksanaan Koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dalam suatu lembaran angket untuk disebar.

4. Dokumentasi

suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, melalui dokumen dokumen yang diperlukan guna melengkapi pengumpulan data primer diatas, dan dilakukan pula pengumpulan data sekunder. pengumpulan data sekunder yang terdapat didalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui sumber dokumentasi data instansi terkait seperti profil desa.

G. Teknik Analisis Data

Setelah diperolehnya data yang dibutuhkan oleh peneliti kemudian melakukan pengolahan dan di analisis dengan menggambarkan variabel pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan melayu Besar.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Waktu kegiatan penelitian Analisis Pelaksanaan Koordinasi dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat diKepenghuluan Melayu Besar kecamatan tanah putih tanjung melawan .

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Daftar Kuesioner																
5	Rekomendasi Survey																
6	Penelitian Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Sripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian komprehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi, kota bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.881,59 km² dan penduduk sejumlah 637.161 jiwa (2021). Rokan Hilir terbagi dalam 18 kecamatan, 25 kelurahan, dan 173 desa. Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolir-nya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu, dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang

dan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau yang diberi nama Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibu kota Ujung Tanjung dan ibu kota sementara di Bagansiapiapi. Bagansiapiapi, dengan infrastruktur kota yang jauh lebih baik, pada tanggal 24 Juni 2008 resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir yang sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU atas perubahan ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999 disahkan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

Kabupaten Rokan Hilir terletak di bagian paling utara dari Provinsi Riau yang juga merupakan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera. Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 Km² atau 888.159 Hektar, terbagi atas 14 kecamatan. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada koordinat 1°14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100°17' hingga 101°21' Bujur Timur

Setelah pembentukan Kecamatan Tanjung Medan pada tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2014, maka wilayah Kabupaten Rokan Hilir menjadi 18 (delapan belas) kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang

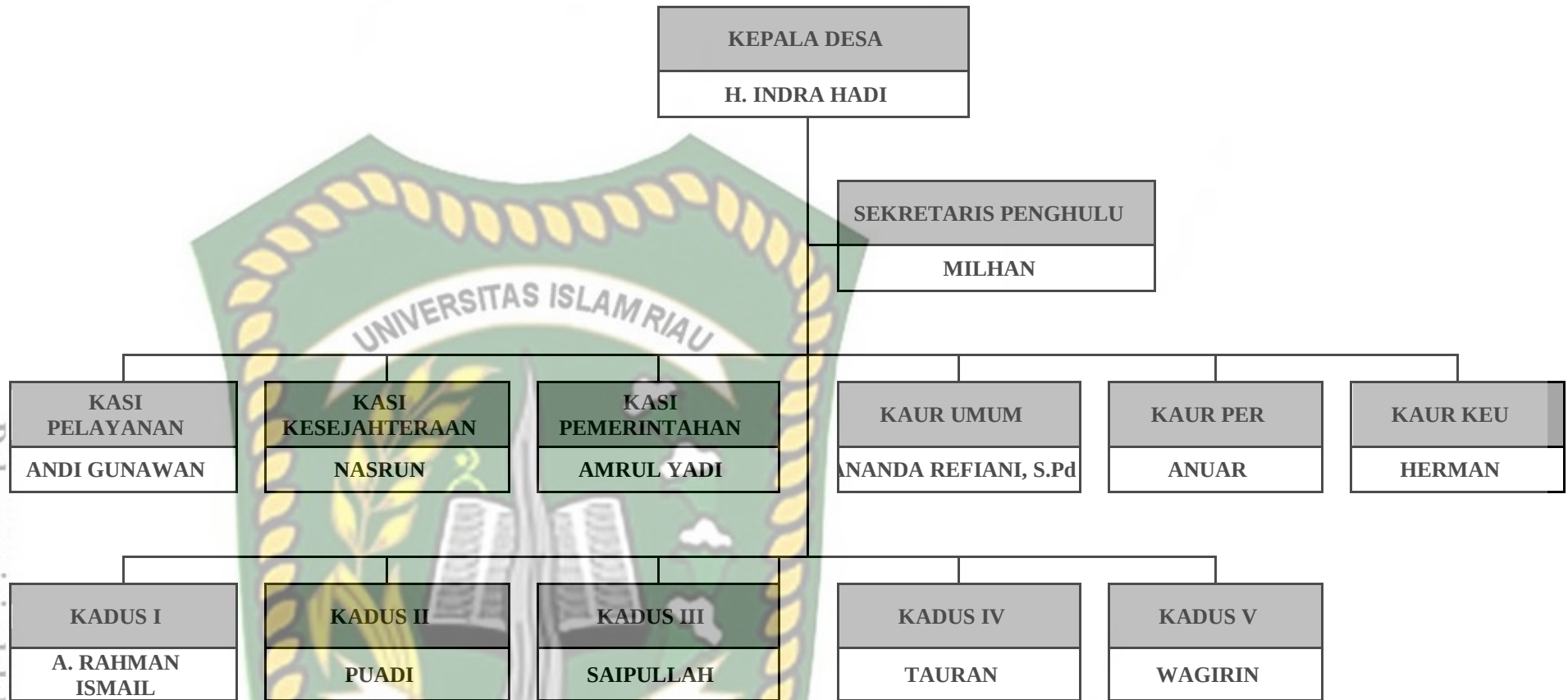
4. Kecamatan Bangko Pusako
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Tanah Putih
7. Kecamatan Kubu
8. Kecamatan Bagan Sinembah
9. Kecamatan Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan
15. Kecamatan Kubu Babussalam
16. Kecamatan Balai Jaya
17. Kecamatan Bagansinembah Raya
18. Kecamatan Tanjung Medan

Dapat diketahui pula bahwa kabupaten rokan hilir terdapat sebuah kecamatan yaitu kecamatan tanah putih tanjung melawan . tanah Putih Tanjung Melawan adalah kampung tua kampung bersejarah, Tanah Putih Tanjung Melawan adalah Bagian dari istana Siak, pada masa dahulu, Bersama Kubu, Bangko, Tanah Putih, Tanah putih Yang sebenar nya adalah tanah putih tanjung melawan, bukan tanah putih sedinginian, "Belanda pertama kali masuk ketanah putih tanjung melawan, dan pindah kebagan siapiapi, karena pada masa dahulu bagan siapiapi penghasilan ikan terbesar, kerjaan Portugal pertama kali masuk di tanah putih tanjung melawan,

posisi Tapak istana nya di seberang labuhan papan, dekat pt asia citra sekarang, kapal natulus pertama kali tersesat di tanah putih tanjung melawan, maka nya di terbit lah buku yang berjudul insiden kapal natulus, Tanah putih tanjung melawan dulu nya adalah kampung tua kampung menatik dengan agama, sehingga banyak makam para ulama di tanah putih tanjung melawan, makam Tuan Syekh Zainuddin Rokan, makam datuk ombun, dan masih banyak makam tua lain nya. Dan tanah putih tanjung dulu banyak orang Tionghoa tinggal di tanah putih Kepenghuluan melayu besar, sekarang tinggal. Kenangan, kuburan Tionghoa tua di sebelah SMP N 1 Tanah Putih Tanjung Melawan yang terdapat dikepenghuluan melayu besar

Kepenghuluan melayu besar merupakan salah satu kepenghuluan yang berada di kecamatan tanah putih tanjung melawan dengan penduduk paling banyak di kecamatan tersebut

B. Struktur Organisasi



C. Fungsi Dan Tugas Organisasi

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Tugas kepala desa menurut UU RI No 6 tahun 2014 pasal 6 ayat 1 yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa

Di dalam melaksanakan tugas nya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bahwa kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala yang produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa

- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Didalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 1, kepala desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dari penjelasan diatas bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya pembinaan dari atasan kepada bawahan, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian (2016:126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang lebih

diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan didalam pelaksanaan tugasnya bahwa kepala desa dibantu oleh :

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan secara demokrasi.

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ;dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

3. Sekretaris Desa.

Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

Adapun fungsi sekretaris desa adalah :

- a. .Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu mempersiapkan penyusunan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- e. Sebagai pelaksana tugas yang lain yang telah diberikan kepada kepala desa.

4. Pelaksana Teknis Desa

- **Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)**

Tugas kepala urusan pemerintah (KAUR PEM) adalah untuk membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, dan kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) yaitu:

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan peraturan desa beserta keputusan kepala desa.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- g. Pelaksana tugas yang lain yang telah diberikan kepada desa.

- **Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)**

Tugas kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah untuk membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksana tugas.

Fungsi kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) yaitu :

- a. Menyiapkan bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
- c. Mengelola tugas pembantuan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

- **Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)**

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah untuk membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) yaitu:

- a. Menyiapkan bahan serta melaksanakan suatu program kegiatan keagamaan.
- b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala desa

- **Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)**

Tugas kepala urusan keuangan (KAUR KEU) untuk membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Fungsi kepala urusan keuangan (KAUR KEU) yaitu:

- a. Mengelola administrasi keuangan desa.
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

- **Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)**

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

- a. Melakukan pengendalian, pengelolaan surat masuk, dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b. Melaksanakan pencatatan inventaris kekayaan desa.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- d. Sebagai penyedia, penyimpanan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- e. Mengelola administrasi perangkat desa.

- f. Mempersiapkan bahan laporan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

5. Pelaksanaan Kewilayahan

• Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas serta kewajiban pada wilayah kerja yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi kepala dusun (KADUS) yaitu :

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah tempat kerja yang telah ditentukan.
- b. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- c. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- d. Membantu kepala desa dalam melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang terapat di dalam bab ini penulis akan menyajikan data data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu pokok pembahasan mengenai analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan tanah Putih tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Dan pokok pembahasan ini merupakan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Dari penyebaran kuisisioner dan wawancara diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

Kemudian setelah itu juga diperoleh data tentang analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir dan pembahasan di dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis maka penulisan terbagi kedalam dua bagian yaitu analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan tanah Putih tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk memeperoleh gambar yang jelas serta data yang telah terkumpul dapat dilihat tabel distribusi frekuensi dibawah ini.

A. Identitas Respoden Penelitian

Penelitian ini mengangkat judul mengenai analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan tanah Putih

tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Adapaun data yang telah peneliti dapat kan selama waktu penelitian yaitu data mengenai keterangan responden dari beberapa hal dan berikut ini peneliti akan memaparkan data mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

1. Umur Responden

Usia merupakan suatu ukuran lamanya hidup seseorang didalam satuan tahun. Serta umur akan berhubungan dengan kemampuan dan aktivitas seseorang didalam melakukan suatu kegiatan serta tingkat kematangan pola pikiran guna untuk mengambil suatu keputusan apa yang harus dan apa yang tidak untuk dilakukan. Untuk mengetahui kelompok umur dari responden penelitian berikut ini peneliti akan menerangkan serta dapat diketahui berdasarkan tabel berikut ini:

Table V.I Distribusi Jumlah Responden Penelitian Kelompok Umur Di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2021

No	Umur	Responden	Persentase
1.	≤ 30 Tahun	10	10%
2.	30-39 Tahun	29	27%
3.	40-49 Tahun	40	38%
4.	≥ 50 Tahun	26	25%
Jumlah		105	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2022

Berdasarkan tabel V.1 di atas, terlihat bahwa responden penelitian pada tingkat umur terbanyak ialah pada umur 40-49 tahun yaitu sebanyak 40 responden atau 38%. Sedangkan responden penelitian berdasarkan umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu umur ≥ 30 Tahun yaitu dengan jumlah 10 responden atau 10%. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan berdasarkan tingkat

pendidikan terakhir, agar dapat menggambarkan bagaimana keadaan responden penelitian pada tingkat pendidikannya, maka berikut adalah tabel distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat intelektual seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat intelektualnya serta sebagai suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir dalam memahami dan menilai sesuatu. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang semakin matang pula pola pikir seseorang di dalam mengambil suatu keputusan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian lapangan identitas responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Table V.2 Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SD	4	3%
2	SMP	21	18%
3	SMA/Sederajat	58	62%
4	Diploma	8	6%
5	Sarjana	14	11%
Jumlah		105	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel V.2 diatas terlihat bahwa pada responden penelitian didominasi oleh tingkat SMA/Sederajat yaitu berjumlah 58 Responden atau 62%. Sedangkan jumlah responden terkecil berdasarkan tingkat pendidikannya itu terdapat pada

pendidikan Diploma yaitu berjumlah 8 responden atau 6%. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan pembagian responden berdasarkan jenis kelamin. Berikut mengenai informasi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

3. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga ikut mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan, baik itu dalam menanggapi berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan mulai dari menanggapi hasil kerja pemerintah desa. Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut:

Table V.3 Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	Laki – laki	59	56%
2	Perempuan	46	44%
	Jumlah	105	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel V.3 di atas terlihat bahwa dalam penelitian ini responden penelitian yang terdiri dari perangkat kepenghuluan, dan masyarakat yang ada dikepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu dengan jumlah 59 responden atau 56%. Sedangkan jumlah responden yang paling kecil menurut jenis kelamin adalah perempuan dengan jumlah 46 responden atau 44%. Setelah

menggambarkan dan menjelaskan kondisi responden melalui identitas jenis kelamin, umur dan tingkatan pendidikan selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai hasil penelitian tentang analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan Melayu besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

B. Hasil dan Pembahasan

Pada sub bab hasil dan pembahasan ini akan dilakukan pemaparan hasil penelitian dan akan dilakukan juga pembahasan dari tanggapan responden penelitian yang terdiri dari perangkat pemerintah kepenghuluan melayu besarseperti Kepala kepenghuluan,sekretaris kepenghuluan,kaur seksi kesra dan kepala dusun yang juga responden masyarakat kepenghuluan melayu besar. Penejelasan terhadap hasil kuisioner dan wawancara tersebut akan penulis jelaskan secara berurutantiap indikator-indikator sebagai berikut.

1. Kerja Sama

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kerja sama adalah inti dari pada koordinasi. Kerja sama dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatursedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kerja sama ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa

kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Tanggapan responden kepala dusun dan BPKep terhadap indikator kerja sama dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel V.4 Tanggapan Responden Kepala Dusun dan BPKep di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Kerja Sama

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlak sana	Kurang Terlak sana	
1	Mengarahkan tindakan yang seragam dan harmonis	5	3	1	9
2	Keselarasan antara pihak-pihak yang terkait	4	5	-	9
3	Partisipasi masyarakat dalam bekerja sama dengan pemerintah	2	4	3	9
4	Apakah waktu penentuan kegiatan sudah sinkron	2	6	1	9
5	Kerjasama apakah sudah terjalin dengan baik	4	3	2	9
Jumlah		17	21	7	45
Skor		51	42	7	100
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden Responden Kepala Dusun dan BPKep di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Kerja Sama. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 17 orang atau berada pada skor 34, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator kerja sama ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana

sebanyak 21 orang atau berada pada skor 42, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator kerja sama ini telah dilaksanakan ini sudah cukup tercapai. Sementara itu yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 orang atau pada skor 14, alasan responden mengatakan kurang terlaksana karena ia merasa bahwa indikator ini masih kurang terlaksana dalam pencapaian tujuannya.

Dari tabel responden kepala dusun dan kepenghuluan tersebut dapat dilihat bahwa Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan pada indikator kerja sama terdapat pada kategori Cukup Terlaksana dengan jumlah total skor 90.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari masyarakat yang berjumlah 96 orang responden terhadap indikator indikator kerja sama dapat dilihat pada tabel V.5 yang telah dikumpulkan peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.5 Tanggapan Responden Masyarakat Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Kerja Sama

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlak sana	Kurang Terlak sana	
1	Mengarahkan tindakan yang seragam dan harmonis	28	57	11	96
2	Keselaran antara pihak-pihak yang terkait	30	50	16	96
3	Partisipasi masyarakat dalam bekerja sama dengan pemerintah	20	40	36	96

4	Apakah waktu penentuan kegiatan sudah sinkron	30	46	20	96
5	Kerjasama apakah sudah terjalin dengan baik	33	42	21	96
Jumlah		141	235	104	480
Skor		423	470	104	997
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden Responden Masyarakat Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terhadap Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Indikator Kerja Sama. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 141 orang atau berada pada skor 423, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator kerja sama ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 235 orang atau berada pada skor 470, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator kerja sama ini telah dilaksanakan ini sudah cukup tercapai. Sementara itu yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 104 orang atau pada skor 104, alasan responden mengatakan kurang terlaksana karena responden merasa bahwa indikator ini masih kurang terlaksana atau bahkan tidak terlaksana dalam pencapaian tujuannya.

Dari tabel responden masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan pada indikator kerja sama terdapat pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan jumlah total skor 960.

Berdasarkan dari hasil observasi pengamatan yang peneliti lakukan tentang kerjasama dapat dikatakan cukup terlaksana dan terstruktur dengan baik dikarenakan koordinasi dalam bekerja sama antara pihak kepenghuluan dengan masyarakat kurang berjalan dengan dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kepala desa yaitu bapak H. Indra Hadi tepat pada tanggal 27 januari 2022 terkait dengan indikator kerjasama beliau mengatakan:

“Kami selaku pemerintah kepenghuluan melayu besar mengajak masyarakat untuk bersama-sama guna membangun pemberdayaan masyarakat kepenghuluan melayu besar agar terciptanya masyarakat yang mandiri dan berdaya demi kemajuan masyarakat itu sendiri ,dan didalam upaya kami untuk mengajak masyarakat agar bekerja bersama-sama dalam kegiatan tersebut kami mengambil langkah untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu kemudian membentuk perangkat yang terkait untuk kelangsungan koordinasi dalam kegiatan tersebut ,disini peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam kegiatan ini agar tercapai dengan baik “ (Wawancara dengan Kepala Kepenghuluan Desa Melayu Besar, 27 Januari 2022)

Sedangkan sekretaris kepenghuluan dengan bapak Milhan tepat pada tanggal 27 januari 2022 beliau mengatakan:

“Kegiatan pemberdayaan yang belum terlaksana di tahun sebelumnya maka kami akan meprioritaskan ditahun ini, dan untuk tercapainya program ini hendaknya kami juga membutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi agar kegiatan ini dapat terwujud dengan tujuan yang ingin dicapai dan kami selaku pemerintah kepenghuluan melayu besar tentu nya akan berupaya agar kegiatan ini dapat terselesaikan secepatnya “.

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa dari seluruh tanggapan responden melalui kuisiонер, observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap penelitian analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan kabupaten rokan dapat dikategorikan cukup terlaksanaDidalam hal ini kerja sama yang telah

dilakukan oleh kepenghuluan melayu besar telah mengambil suatu kebijakan dan telah sesuai dengan prosedur yang telah ada dengan melakukan berbagai musyawarah desa dari tingkat bawah kemudian dilanjutkan ke tingkat atas dan didalam hal ini tentunya berkaitan dengan fenomena point pertama bahwa masih ada nya program pemberdayaan yang belum terlaksana karena belum bisa diselesaikan dan akan diprioritaskan pada tahun ini. Indikator selanjutnya adalah pembagian kerja yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

2. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah pengkhususan yang di pertimbangkan antara lain perincian tugas, pengadaan dan penempatan pegawai, kewajiban dan tanggung jawab agar agar terdapat efisiensi dalam menggunakan tenaga atau antara instansi-instansi yang terkait. Tanggapan responden kepala dusun dan BPKep terhadap pembagian kerja dapat dilihat pada tabel V.6 sebagai berikut.

Tabel V.6 Tanggapan Responden Kepala Dusun dan BPKep di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Pembagian Kerja

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlak sana	Kurang Terlak sana	
1	Program pembuatan kolam ikan darat ini sudah sesuai dengan ketentuan	6	2	1	9
2	Pembagian kerja yang telah ditetapkan dalam program pembuatan kolam ikan darat ini sudah tepat sasaran	4	5	-	9
3	Apakah ada pelaksana dari program	2	5	2	9

	pembuatan kolam ikan darat ini yang tidak berkompeten dalam melaksanakan tugas nya				
4	Apakah ada pelaksana dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembuatan kolam ikan darat ini yang tidak sesuai keahliannya	3	5	1	9
5	Apakah ada para pelaksana program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembuatan kolam darat ini yang tidak menjalankan tugasnya	5	1	3	9
Jumlah		20	18	7	45
Skor		60	36	14	110
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden Responden Kepala Dusun dan BPKep di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Pembagian Kerja. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 20 orang atau berada pada skor 40, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Pembagian Kerja ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 orang atau berada pada skor 36, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Pembagian Kerja ini telah dilaksanakan ini sudah cukup tercapai. Sementara itu yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 orang atau pada skor 14, alasan responden mengatakan kurang terlaksana karena ia merasa bahwa indikator ini masih kurang terlaksana dalam pencapaian tujuannya.

Dari tabel responden kepala dusun dan kepenghuluan tersebut dapat dilihat bahwa Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih

Tanjung Melawan pada indikator Pembagian Kerja terdapat pada kategori **Terlaksana** dengan jumlah total skor 110. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari masyarakat yang berjumlah 96 orang responden terhadap indikator pembagian Kerja dapat dilihat pada tabel V.7 yang telah dikumpulkan peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.7 Tanggapan Responden Masyarakat Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Pembagian Kerja

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlak sana	Kurang Terlak sana	
1	Program pembuatan kolam ikan darat ini sudah sesuai dengan ketentuan	35	43	18	96
2	Pembagian kerja yang telah ditetapkan dalam program pembuatan kolam ikan darat ini sudah tepat sasaran	35	45	16	96
3	Apakah ada pelaksana dari program pembuatan kolam ikan darat ini yang tidak berkompeten dalam melaksanakan tugas nya	30	50	16	96
4	Apakah ada pelaksana dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembuatan kolam ikan darat ini yang tidak sesuai keahliannya	43	35	18	96
5	Apakah ada para pelaksana program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembuatan kolam darat ini yang tidak menjalankan tugasnya	33	42	21	96
Jumlah		176	215	89	480
Skor		528	430	89	1047
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden Responden Masyarakat Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terhadap Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Indikator Pembagian Kerja. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 176 jawaban atau berada pada skor 528, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Pembagian Kerja ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 215 orang atau berada pada skor 430, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Pembagian Kerja ini telah dilaksanakan ini sudah cukup tercapai. Sementara itu yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 89 orang atau pada skor 89, alasan responden mengatakan kurang terlaksana karena responden merasa bahwa indikator ini masih kurang terlaksana atau bahkan tidak terlaksana dalam pencapaian tujuannya.

Dari tabel responden masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan pada indikator Pembagian Kerja terdapat pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan jumlah total skor 1047. Dalam hal ini dikarenakan didalam pembagian kerja untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan dilakukan semata mata agar masyarakat dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan guna mensejahterakan masyarakat situ sendiri yang berada pada wilayah kepenghuluan melayu besar dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan dari hasil observasi pengamatan yang peneliti lakukan tentang pembagian kerja dapat dikatakan cukup terlaksana dan terstruktur dengan baik

dikarenakan koordinasi dalam pembagian kerja dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kepala desa yaitu bapak H. Indra Hadi tepat pada tanggal 27 Januari 2022 terkait dengan indikator pembagian kerja beliau mengatakan:

“Kami selaku pemerintah kepenghuluan mengusahakan agar perincian kerja masing-masing divisi dapat teranulir dengan baik sehingga sistem pembagian kerja dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak adanya divisi yang berjalan sendiri-sendiri. Agar semua pihak dapat turut andil dalam pemberdayaan masyarakat.” (Wawancara dengan Kepala Kepenghuluan Desa Melayu Besar, 27 Januari 2022)

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa dari seluruh tanggapan responden melalui kuisisioner, observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap penelitian analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan kabupaten rokan dapat dikategorikan cukup terlaksana. Dalam hal ini pembagian kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kepenghuluan telah diusahakan sesuai dengan prosedur yang ada agar setiap divisi yang ada dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga program pemberdayaan dapat diprioritaskan pada tahun ini. Indikator selanjutnya adalah komunikasi yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

3. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan

pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Tanggapan responden kepala dusun dan BPKep terhadap pembagian kerja dapat dilihat pada tabel V.8 sebagai berikut:

Tabel V.8 Tanggapan Responden Kepala Dusun dan BKep di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Komunikasi

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlak sana	Kurang Terlak sana	
1	Sosialisasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program kolam ikan darat	5	3	1	9
2	Penyampaian informasi tentang program pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat	3	5	1	9
3	Pelaksanaan Koordinasi antara pihak yang terkait Apakah sudah terjalin dengan baik	3	4	2	9
4	Koordinasi antara pemerintah kepenghuluan dengan pemerintah kecamatan mengenai masalah dalam program pemberdayaan	5	4	-	9
5	Rapat mengenai permasalahan dalam program pemberdayaan	4	4	1	9
Jumlah		20	20	5	45
Skor		60	40	5	105
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden Responden Kepala Dusun dan BPKep di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Komunikasi. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 20 orang atau

berada pada skor 60, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Komunikasi ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 orang atau berada pada skor 40, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Komunikasi ini telah dilaksanakan ini sudah cukup tercapai. Sementara itu yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 orang atau pada skor 5, alasan responden mengatakan kurang terlaksana karena ia merasa bahwa indikator ini masih kurang terlaksana dalam pencapaian tujuannya.

Dari tabel responden kepala dusun dan kepenghuluan tersebut dapat dilihat bahwa Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan pada indikator Komunikasi terdapat pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan jumlah total skor 90. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari masyarakat yang berjumlah 96 orang responden terhadap indikator Komunikasi dapat dilihat pada tabel V.9 yang telah dikumpulkan peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.9 Tanggapan Responden Masyarakat Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Komunikasi

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlak sana	Kurang Terlak sana	
1	Program pembuatan kolam ikan darat ini sudah sesuai dengan	21	59	16	96

	ketentuan				
2	Pembagian kerja yang telah ditetapkan dalam program pembuatan kolam ikan darat ini sudah tepat sasaran	17	49	30	96
3	Apakah ada pelaksana dari program pembuatan kolam ikan darat ini yang tidak berkompeten dalam melaksanakan tugas nya	29	43	24	96
4	Apakah ada pelaksana dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembuatan kolam ikan darat ini yang tidak sesuai keahliannya	23	55	18	96
5	Apakah ada para pelaksana program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembuatan kolam darat ini yang tidak menjalankan tugasnya	37	39	20	96
Jumlah		127	245	108	480
Skor		381	490	108	979
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden Responden Masyarakat Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terhadap Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Indikator Komunikasi. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 176 jawaban atau berada pada skor 528, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Komunikasi ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 215 orang atau berada pada skor 430, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Komunikasi ini telah dilaksanakan ini sudah cukup tercapai. Sementara itu yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 89 orang atau pada skor 89, alasan responden mengatakan kurang terlaksana karena responden

merasa bahwa indikator ini masih kurang terlaksana atau bahkan tidak terlaksana dalam pencapaian tujuannya.

Dari tabel responden masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan pada indikator Komunikasi terdapat pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan jumlah total skor 1047. Dalam hal ini dikarenakan didalam Indikator Komunikasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan dilakukan agar masyarakat dapat bekerja untuk menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan kepenghuluan untuk mencapai tujuan guna mensejahterakan masyarakat situ sendiri yang berada pada wilayah kepenghuluan melayu besar dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan dari hasil observasi pengamatan yang peneliti lakukan tentang pembagian kerja dapat dikatakan cukup terlaksana dan terstruktur dengan baik dikarenakan koordinasi dalam pembagian kerja dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kepala desa yaitu bapak H. Indra Hadi tepat pada tanggal 27 januari 2022 terkait dengan indikator komunikasi beliau mengatakan:

“Komunikasi antar seluruh pihak yang terkait yang mengelola progarm tentu saja merupakan peran penting agar dapat membantu menyuksekkan program pemberdayaan masyarakat. Kami sebagai pihak kepenghuluan mengusahakan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat agar masyarakat dapat turut andil sehingga terciptanya suatu hubungan kerjasama yang harmonis guna kelancaran dan pencapaian program Pemberdayaan tersebut. Kami berharap pihak-pihak yang terlibat dapat bersama-sama saling membantu agar terdapat keselarasan yang baik. Maka dari itu kami mengadakan rapat atau pertemuan yang sifatnya memberikan input atau masukan dalam melaksanakan program dari seluruh pihak yang terkait”(Wawancara dengan Kepala Kepenghuluan Desa Melayu Besar, 27 Januari 2022)

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa dari seluruh tanggapan responden melalui kuisioner, observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap penelitian analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan melayu besar kecamatan tanah putih tanjung melawan kabupaten rokan dapat dikategorikan cukup terlaksana. Dalam hal ini komunikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kepenghuluan telah diusahakan sesuai dengan prosedur yang ada agar setiap divisi yang ada dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga program pemberdayaan dapat diprioritaskan pada tahun ini, namun pada kenyataan masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui program pemberdayaan masyarakat ini, sehingga dapat disimpulkan indikator komunikasi cukup terlaksana namun masih perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Kepenghuluan dan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi dan antusias masyarakat terhadap program tersebut. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut harus ada komunikasi yang baik antar seluruh pihak. Indikator selanjutnya adalah disiplin yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi. Tanggapan responden kepala dusun dan BPKep terhadap pembagian kerja dapat dilihat pada tabel V.10 sebagai berikut.

Tabel V.10Tanggapan Responden Kepala Dusun dan BKep di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Disiplin

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlak sana	Kurang Terlak sana	
1	Tingkat kedisiplinan dalam berkoordinasi apakah mempengaruhi kinerja organisasi	5	3	1	9
2	Apakah ada tindakan tegas apabila anggota tidak menjalankan tugas dengan baik	5	2	3	9
3	Apakah ada anggota yang tidak melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program pembuatan kolam ikan darat	3	4	2	9
4	Koordinasi antara pemerintah kepenghuluan dengan pemerintah kecamatan mengenai masalah dalam program pemberdayaan	5	4	-	9
5	Rapat mengenai permasalahan dalam program pemberdayaan	5	3	1	9
Jumlah		23	16	7	45
Skor		69	32	7	108
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden Responden Kepala Dusun dan BPKep di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Disiplin. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 23 orang atau berada pada skor 69, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Disiplin ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 16 orang atau berada pada skor 32, adapun kesimpulan dari responden

menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Disiplin ini telah dilaksanakan ini sudah cukup tercapai. Sementara itu yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 orang atau pada skor 7, alasan responden mengatakan kurang terlaksana karena ia merasa bahwa indikator ini masih kurang terlaksana dalam pencapaian tujuannya.

Dari tabel responden kepala dusun dan kepenghuluan tersebut dapat dilihat bahwa Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan pada indikator Disiplin terdapat pada kategori **Terlaksana** dengan jumlah total skor 109. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari masyarakat yang berjumlah 96 orang responden terhadap indikator indikator Disiplin dapat dilihat pada tabel V.10 yang telah dikumpulkan peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.11 Tanggapan Responden Masyarakat Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Disiplin

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlak sana	Kurang Terlak sana	
1	Tingkat kedisiplinan dalam berkoordinasi apakah mempengaruhi kinerja organisasi	44	35	17	96
2	Apakah ada tindakan tegas apabila anggota tidak menjalankan tugas dengan baik	31	49	16	96
3	Apakah ada anggota yang tidak melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam programpembuatan kolam ikan darat	27	46	23	96

4	Koordinasi antara pemerintah kepenghuluan dengan pemerintah kecamatan mengenai masalah dalam program pemberdayaan	30	39	27	96
5	Rapat mengenai permasalahan dalam program pemberdayaan	17	57	22	96
Jumlah		149	225	105	480
Skor		447	450	105	1002
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden Responden Masyarakat Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terhadap Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Indikator Disiplin. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 149 jawaban atau berada pada skor 447, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Disiplin ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 225 orang atau berada pada skor 450, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa indikator Disiplin ini telah dilaksanakan ini sudah cukup tercapai. Sementara itu yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 105 orang atau pada skor 105, alasan responden mengatakan kurang terlaksana karena responden merasa bahwa indikator ini masih kurang terlaksana atau bahkan tidak terlaksana dalam pencapaian tujuannya.

Dari tabel responden masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan pada indikator Disiplin terdapat pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan jumlah total skor 1002. Dalam hal ini dikarenakan didalam

indikator Disiplin agar kegiatan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan dapat terwujud untuk disiplin dalam bekerja bersama-sama sehingga tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat itu sendiri yang berada pada wilayah kepenghuluan melayu besar dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan dari hasil observasi pengamatan yang peneliti lakukan tentang pembagian kerja dapat dikatakan cukup terlaksana dan terstruktur dengan baik dikarenakan koordinasi dalam pembagian kerja dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kepala desa yaitu bapak H. Indra Hadi tepat pada tanggal 27 Januari 2022 terkait dengan indikator disiplin beliau mengatakan:

“Dari kami pihak pemerintahan Kepenghuluan mengusahakan agar setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, sehingga dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Kami mengupayakan agar setiap bagian-bagian yang terkait disiplin akan porsi kerja yang sudah diberikan sehingga program yang sudah di programkan terwujud sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di Desa ini...” **(Wawancara dengan Kepala Kepenghuluan Desa Melayu Besar, 27 Januari 2022)**

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa dari seluruh tanggapan responden melalui kuisioner, observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap penelitian analisis koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan dapat dikategorikan cukup terlaksana. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada program yang belum terealisasi seperti realisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan kolam ikan darat yang baru akan diupayakan pada tahun ini. Maka dari ditarik kesimpulan bahwasanya disiplin kerja masih kurang terlaksana, dampaknya masih ada program yang terbengkalai dalam prosesnya. Tentu saja ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini.

C. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir

Setelah melakukan pembahasan masing-masing indikator maka untuk melihat hasil penelitian secara keseluruhan perlu dilakukan rekapitulasi seluruh tanggapan responden penelitian mengenai Analisis Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, meliputi 4 indikator penelitian. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada tabel V.11 berikut.

Tabel V.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Kepala Dusun dan BKep di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Disiplin

No	Indikator Penelitian	Jawaban Responden			Skor	Kategori
		Terlak sana	Cukup Terlak sana	Kurang Terlak sana		
1	Kerja Sama	17	21	7	100	Cukup Terlaksana
2	Pembagian Kerja	20	18	7	110	Cukup Terlaksana
3	Komunikasi	20	20	5	105	Cukup Terlaksana
4	Disiplin	23	16	7	108	Cukup Terlaksana
Jumlah Skor		423				
Kategori		Terlaksana				

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel V.11 di atas dapat diketahui dari 4 indikator dari 9 responden kepenghuluan, dapat diketahui hasil rekapitulasi jawaban responden kepala dusun di kepenghuluan dalam penelitian tentang Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan dari keseluruhan skor yang berjumlah 423 pada rentang skor 421-540 pada kategori **Terlaksana** yang berdasarkan jawaban responden kepala dusun dan Bkep di kepenghuluan Melayu Besar dari hasil penyebaran kuesioner. Akan tetapi dalam hal ini menurut penulis masih banyak yang harus diperhatikan oleh pelaksana koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada desa Melayu Besar tersebut. Selanjutnya rekapitulasi jawaban masyarakat akan dijelaskan pada tabel V.12 berikut.

Tabel V.13 Tanggapan Responden masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Indikator Disiplin

No	Indikator Penelitian	Jawaban Respoden			Skor	Kategori
		Terlak sana	Cukup Terlak sana	Kurang Terlak sana		
1	Kerja Sama	141	235	104	997	Cukup Terlaksana
2	Pembagian Kerja	176	215	89	1047	Terlaksana
3	Komunikasi	127	245	108	979	Cukup Terlaksana
4	Disiplin	149	225	105	1002	Terlaksana
Jumlah Skor		4025				
Kategori		Cukup Terlaksana				

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel V.11 di atas dapat diketahui dari 4 indikator dari 96 responden, didapatkan hasil rekapitulasi jawaban responden masyarakat dalam penelitian tentang Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan dari keseluruhan skor yang berjumlah 4025 pada rentang skor 3201-4480 pada kategori **Cukup Terlaksana** yang berdasarkan jawaban responden masyarakat di desa Melayu Besar dari hasil penyebaran kuesioner. Melihat dari hasil ini, menurut penulis masih banyak yang harus diperhatikan oleh pelaksana koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, terlebih pada kurangnya koordinasi antara bidang kepenghuluan dan masyarakat serta sosialisasi yang perlu ditingkatkan sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih signifikan pada desa Melayu Besar tersebut.

Dari hasil pengumpulan data yang menggunakan teknik kuesioner, wawancara, observasi serta dokumentasi, pelaksanaan Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan secara efektif atau dikategorikan cukup terlaksana. Masih banyak hal yang perlu dimaksimalkan dari pemberdayaan masyarakat pada di Desa Melayu Besar sehingga dapat menjadi kepenghuluan yang partisipasif serta berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan dengan program pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga program dalam pembuatan kolam ikan darat dapat terealisasi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat jika dikelola dengan baik, hal ini tentu dapat diwujudkan dengan koordinasi yang baik terhadap antara masyarakat dan pihak

Kepenghuluan. Selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kepenghuluan Melayu Besar pada poin selanjutnya.

D. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar

Hambatan merupakan suatu rintangan ataupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan. Hambatan ini bisa menjadi penyebab yang bisa mempengaruhi proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang peneliti rangkum yaitu:

1. Hambatan untuk indikator kerja sama ialah masih kurangnya koordinasi setiap anggota organisasi atau satu organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota satu organisasi lainnya agar tidak adanya organisasi tersebut yang berjalan sendiri-sendiri baik dari masyarakat serta Kepenghuluan. Oleh sebab itu konsep kerja sama adalah inti dari pada koordinasi antara masyarakat dan Kepenghuluan tersebut harus dapat diwujudkan. Kerja sama ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
2. Hambatan untuk indikator komunikasi ialah masih kurang lancarnya komunikasi antar pihak yang terkait dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Melayu Besar,

seperti masih adanya masyarakat yang masih belum mengetahui pengadaan pemberdayaan masyarakat. Dapat dimaknai bahwasanya belum meratanya penyebaran informasi yang ada dikarenakan adanya *gap* dalam hal komunikasi. Pada dasarnya hubungan kerjasama yang harmonis dimulai dari komunikasi yang baik guna kelancaran dan pencapaian Program Pemberdayaan bagi masyarakat sehingga masyarakat dalam seluruhnya terlibat dalam pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

3. Hambatan untuk indikator disiplin ialah masih ada program yang belum terealisasi seperti realisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan kolam ikan darat yang baru akan diupayakan pada tahun ini. Maka dari ditarik kesimpulan bahwasanya disiplin kerja masih kurang terlaksana, dampaknya masih ada program yang terbengkalai dalam prosesnya. Maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja masih cukup perlu diperhatikan agar pelaksanaan program dapat direalisasikan tepat pada waktunya dan tidak terbengkalai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk indikator komunikasi yang memiliki item penelitian tentang sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan terjalannya koordinasi antara instansi terkait mengenai pelaksanaan pemberdayaan, dari keseluruhan hasil yang diperoleh ialah cukup terlaksana. Dikarenakan sosialisasi kegiatan belum tercapai secara efektif, karena masih kurangnya informasi yang menyeluruh akan kegiatan sosialisasi pemberdayaan, menandakan bahwasanya komunikasi yang baik belum terjalin antara pihak masyarakat dan pihak yang terkait. Serta koordinasi antara instansi terkait mengenai pemberdayaan masyarakat yang masih belum maksimal, dikarenakan kurangnya komunikasi antar pihak terkait yang menyebabkan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri.
2. Untuk indikator kerja sama yang memiliki item penelitian ada tidaknya bentuk kesepakatan serta ada atau tidaknya pelaksanaan kegiatan, dari hasil keseluruhan hasil yang diperoleh ialah cukup terlaksana. Dikarenakan bentuk kesepakatan yang diperlukan sudah terpenuhi dengan baik, perincian tugas dan pekerjaan dalam instansi sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat berhasil dengan baik. Dengan kata lain, pembagian kerja yang baik dapat mempercepat proses pembangunan di Kepenghuluan tersebut

3. Untuk indikator pembagian tugas pada kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembagian kerja dalam kegiatan pemberdayaan, dari hasil keseluruhan hasil yang didapat ialah cukup terlaksana. Dikarenakan dalam pembagian tugasnya masih kurang, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti, pembagian masih kurang terkoordinir dengan baik sehingga kegiatan pemberdayaan tersebut masih akan diupayakan
4. Untuk indikator disiplin yang memiliki item penilaian ada tidaknya sanksi pelanggar kesepakatan serta ada atau tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi, dari keseluruhan hasil yang diperoleh ialah cukup terlaksana. Dikarenakan koordinasi yang masih kurang maksimal sehingga setiap penyesuaian bagian-bagian bekerja belum terlaksana sesuai pada waktunya.
5. Untuk hambatan koordinasi secara keseluruhan yaitu kurang nya informasi yang diberikan pemerintah kepenghuluan sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ini dan juga pemerintah setempat kurang memprioritaskan kegiatan ini untuk dilakukan secepat mungkin .

B. Saran

Adapun beberapa saran yang peneliti buat dari keseluruhan hasil yang telah didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Demi terlaksananya program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, peneliti mengharapkan kepada pelaksana program terlebih terhadap pemerintah daerah serta kepenghuluan Desa Melayu Besar, agar dapat mengupayakan dan memfokuskan program pemberdayaan sehingga tujuan dari perencanaan yang telah dibuat dapat diwujudkan agar dapat membantu dalam proses percepatan pembangunan desa di Kepenghuluan tersebut, dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
2. Peneliti juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui tentang program pemberdayaan masyarakat sehingga komunikasi dapat tercipta dan masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam mewujudkan program yang telah diprogramkan oleh pemerintah setempat.
3. Peneliti juga menyarankan kepada masyarakat Melayu Besar agar dapat terus berperan aktif dalam membantu merealisasikan program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah setempat. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan optimal atas kerja sama masyarakat dan pemerintah dalam mensukseskan program.

DAFTAR PUSAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung; CV Pustaka Setia.
- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Andry, Hendry. 20015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Ambar, Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Buku Pedoman Penulisan Edisi Revisi, 2013. Pekanbaru : UIR Press
- Darwis,dkk, 2009. *Dasar Dasar Manajemen*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan UR
- Hanim, sufian,2003. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, UIR Press Pekanbaru
- Hasibuan, Melayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. CV. Haji Mas Agung.
- Handoko, T. Tani, 2003. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA
- Hasibuan, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Jamaludin, 2016. *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Manullang, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ndaraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nugroho, I. dan Dahuri R, 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Siagian, Sondang P, 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Raja Grafindo
- Siagian, Sondang P, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Bumi Aksara
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta: Erlangga

Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Administrasi di Lengkapi Dengan Metode R&D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : AIFI

Tarmizi& Hendry, 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

Terry, R George, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, PT Bumi Aksara, jakarta.

Zulkifli, Awang, Azam, dkk. 2013. *Buku Panduan Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*, Pekanbaru: Fisipol UIR

Zulkifli & Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: MarpoyanTujuh Publishing

Dokumentasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Lampiran